

BAB 4

SIMPULAN

Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kegiatan pertanggungjawaban ini dikenal dengan istilah akuntabilitas sektor publik. Ada empat tipe akuntabilitas yaitu *compliance accountability*, *anticipatory accountability*, *negotiated accountability*, dan *discretionary accountability*. Masing-masing negara memiliki tipe akuntabilitas yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Tipe akuntabilitas pada tiap negara ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor ekonomi, politik, demografi dan sebagainya.

Perbedaan tipe-tipe akuntabilitas yang dianut masing-masing negara membuat adanya pengaruh pada kegiatan akuntansi pemerintahan yang diselenggarakan. Hal ini disebabkan karena akuntansi pemerintahan merupakan alat atau sarana pertanggungjawaban sehingga bagaimana bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang diinginkan sangat tergantung pada tipe-tipe akuntabilitas yang dianut.

Pada masa sekarang, tipe akuntabilitas yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah *discretionary accountability*. Hal ini disebabkan karena Indonesia memasuki masa reformasi, yang mana memberikan kebebasan kepada masyarakat, akan tetapi kebebasan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga cocok dengan karakteristik dari tipe *discretionary accountability*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Daniri, Mas Achmad, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Peranannya- dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Depatemen Keuangan Republik Indonesia, 2001, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah*, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah, Jakarta.
- Hoesada, Jan, 2005, *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah*, *Akuntansi*, Edisi 52, Januari: 44-46.
- Kearns, Kevin P, 1995, *Accountability and Entrepreneurial Public Management: The Case of the Orange County Investment Fund*, *Accountability and Entrepreneurial Public Management*, Hal: 3-21.
- Mulgan, Richard, 2002, *Comparing Accountability in the Public and Private Sectors*, *Australian Journal of Public Administration*, March: 87-97.
- Nurkholis, 2002, *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Pemerintahan Menyongsong Otonomi Daerah*, *Lintasan Ekonomi*, Volume XIX, Januari: 67-72.
- Rosjidi, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar, dan Metode*, Aksara Satu, Surabaya.
- Sadjiarto, Arja, 2000, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2, No 2, Nopember: 138-150.
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.